

DESA WISATA: SEBUAH UPAYA MENGEMBANGKAN POTENSI DESA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

**(Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten
Gunungkidul)**

**Muhammad Farid Ma'ruf, Badrudin Kurniawan,
Rizky Purna Aji Galih Pangestu
Universitas Negeri Surabaya
Email: muhammadfarid@unesa.ac.id**

ABSTRAK

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternatif pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata desa adalah Kabupaten Gunungkidul propinsi Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dimana lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil penelitian pemerintah desa telah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menata ulang dan menggali obyek-obyek wisata yang sebelumnya belum ada sehingga dapat dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat telah menyediakan prasarana wisata yang dibutuhkan wisatawan berupa empat sampah, mushola, kamar mandi, warung makan dan sebagainya, sedangkan prasarana wisata yang masih belum disediakan adalah fasilitas kesehatan seperti klinik dan Apotek. Klinik Kesehatan atau Apotek perlu disediakan bagi wisatawan karena jika wisatawan mendadak sakit bisa tidak jauh-jauh untuk membeli obat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan sarana wisata bagi wisatawan berupa alat transportasi yaitu pick up dan untuk menginap sudah disediakan home stay. Sarana wisata di Desa Wisata Bejiharjo ini masih belum lengkap karena belum disediakan gazebo dan rumah makan. Pemerintah desa telah membuat surat keputusan (SK) penetapan kelompok wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo, namun masih terdapat beberapa kelompok pengelola wisata yang belum memiliki SK penetapan sebagai pengelola wisata dari pemerintah desa.

Kata Kunci: Desa Wisata Bejiharjo

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah di level daerah untuk mengurus, mengelola, dan mengatur sebagian besar kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya lebih leluasa. Hal tersebut tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa sebagai daerah otonom, kabupaten/kota mempunyai hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota secara prinsip dalam rangka pembangunan diperluas kepada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu desa.

Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan Desa harus

mampu menyusun program kerja dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan Desa. Dalam hal pengelolaan Pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternative pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata menurut Nuryanti (dalam Edwin, 2015:154) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata desa adalah Kabupaten Gunungkidul propinsi Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunungkidul, hingga Juni 2015 setidaknya sudah ada 20 desa wisata yang siap bersaing memajukan pariwisata di Bumi Handayani. Salah satu desa yang ditetapkan menjadi desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul

adalah Desa Bejiharjo melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 013/KPTS/2012, tanggal 3 Januari 2012. Kesuksesan dalam pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo terbukti secara nasional, sehingga pada tahun 2012, Desa ini mendapat penghargaan dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata terbaik Nasional.

Potensi wisata desa Bejiharjo cukup beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan kerajinan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Desa Wisata Bejiharjo ini memiliki banyak potensi wisata, seperti wayang beber, goa glatik, penyulingan minyak kayu putih, situs megalitik, cave tubing goa pindul, telaga mriwis putih, body rafting sungai oyo, kerajinan blangkon dan masih banyak lainnya.

Sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata yang dimiliki Desa Bejiharjo, pemerintah desa bersama masyarakat membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bejiharjo Nomor: 15/KPTS/2010, pembentukan Pokdarwis Dewa Bejo bertujuan mengelola dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di Desa Wisata Bejiharjo. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo memiliki peran penting dalam mempromosikan dan menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Desa Wisata Bejiharjo. Peningkatan jumlah wisatawan yang sangat signifikan yang mengunjungi

Desa Wisata Bejiharjo berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa dari sumber wisata. Meskipun kontribusi keuangan yang bersumber dari aktifitas wisata desa cukup signifikan, namun sesungguhnya kontribusi keuangan dari kegiatan wisata desa sangat mungkin dapat ditingkatkan. Salah satu indikatornya adalah masih adanya Kelompok Sadar Wisata lain (belum resmi) yang secara “mandiri” mengelola obyek wisata yang ada di desa Bejiharjo. Kelompok sadarwisata ini belum sadar memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah desa, sehingga potensi sumber keuangan belum maksimal. Persoalan lainnya adalah masih kurangnya keterlibatan pemerintah desa aspek regulasi penataan obyek wisata di desa bejiharjo.

Berdasarkan rangkaian masalah dan kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji kemudian mendiskripsika berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pokdarwis, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Upaya tersebut dikaji berdasarkan variable prasarat desa Wisata sebagaimana dirumuskan oleh Suwantoro (2004:19) yang meliputi ; variabel obyek daya tarik wisata, variable prasarana wisata, variable sarana wisata, variable tatalaksana/infrastruktur, dan variable masyarakat/lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dimana lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yang meliputi: Kepala Desa Bejiharjo dan Ketua BPD Desa Bejiharjo, Ketua dan Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Bejiharjo.

Analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Drawing/Verification, dimana fokus kajian penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pengembangan Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Fokus kajian dianalisis dengan konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata sebagaimana dirumuskan oleh Suwanto (2004:19) yang kajiannya meliputi ;a) variable obyek daya tarik wisata, b). variable prasarana wisata, c). variable sarana wisata, d). variable tatalaksana/infrastruktur, dan e). variable masyarakat/lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Desa dan Peluang Peningkatan Pendapatan Desa

Sinyal penguatan praktek otonomi desa sangat nampak dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya formalisasi tersebut, pemerintah desa sebagai sebuah entitas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat paling bawah, diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat desanya sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Secara konkrit, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa, menyusun rencana pembangunan dan menggali/mengelola sumber sumber pendapatan Desa. dibentuk melalui prakarsa dari Pemerintah Desa. Dengan demikian, sebagai daerah otonom, maka desa dituntut untuk mampu merencanakan pembangunan secara sistematis. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa meliputi rencana strategi (Renstra) desa, Rencana Jangka Menengah dan Panjang Desa (RPJMPDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) yang memuat konsep desain perencanaan pembangunan desa. Perencanaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun Anggaran Belanja pemerintah Desa (APBDesa) seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Sebagaimana struktur anggaran pada APBD pada pemerintahan di atasnya seperti Propinsi, Kabupaten atau Kota, maka secara garis besar APBdesa memiliki 3 (tiga) komponen utama yaitu Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan. Salah satu komponen penting dalam APB Desa adalah komponen pendapatan, yang dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan sumber pendapatan lain. Sumber penting Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli desa (PADesa) yang bermakna hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sumber utama Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari :

1. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Bagi Hasil Pajak
3. Bagi Hasil Retribusi
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan gambaran struktur pendapatan tersebut, pendapatan desa selain dari sumber dari transfer dana pemerintah pusat dalam bentuk

Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Daerah (Propinsi/kabupaten/ Kota) dan sumber lainnya. Selain itu, pemerintah desa diperkenankan menggali dan mengelola sumber pendanaan yang merupakan hasil usaha desa tersebut. Salah satu upayanya adalah memaksimalkan potensi yang ada di desa untuk dikembangkan dan menjadi sumber pendanaan bagi desa. Dengan demikian, dalam rangka pembangunan desa dan kemandirian desa, desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Upaya mengelola potensi desa yang mampu menyokong pendapatan desa sudah lama dirintis oleh pemerintah dan masyarakat desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, salah satunya melalui pemanfaatan sector pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi yang terbuka untuk dikembangkan di desa Bejiharjo, karena memiliki cukup banyak obyek wisata. Obyek wisata didesa Bejiharjo digolongkan menjadi beberapa jenis obyek wisata antara lain: obyek wisata alam, budaya, sejarah, kerajinan dan kuliner. Selain itu, beberapa persyaratan sebagai desa wisata yaitu akses jalan yang cukup baik, memiliki obyek-obyek wisata yang beragam, banyaknya dukungan dari masyarakat sekitar, keamanan desa, tersedia akomodasi yang memadai, dan memiliki iklim yang sejuk karena masih merupakan kawasan pedesaan serta dekat dengan obyek-

obyek wisata yang sudah dikenal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang sangat besar ke Desa Bejiharjo. Peningkatan jumlah kunjungan wisata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa dari sumber wisata. Kenaikan kontribusi aktifitas wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Wisata Bejiharjo dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kontribusi Pendapatan Desa Wisata Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bejiharjo Tahun 2011-2015

Tahun	PAD Desa	Kontribusi dari Wisata
2011	1.147.157.179,75	15.000.000,00
2012	715.496.700,00	16.000.000,00
2013	661.133.751,98	22.000.000,00
2014	731.421.765,00	15.000.000,00
2015	464.079.676,00	370.519.000,00

Sumber: Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Bejiharjo, 2015

Berdasarkan data PAD Desa Bejiharjo dapat dijelaskan bahwa kontribusi sector wisata terhadap Pendapatan Asli Desa cukup besar. Data tersebut juga menggambarkan bahwa prosentase kontribusi dana dari sumber pariwisata meningkat setiap tahun. Hasil kajian memberikan gambaran bahwa potensi sumber pendanaan dari sector wisata di desa Bejiharjo masih dapat ditingkatkan. Selain itu, aktifitas ekonomi pendukung kegiatan wisata masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan pada akhirnya member kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa Bejiharjo.

2. Analisis Variabel Desa Wisata di Desa Bejiharjo

Kajian pengembangan desa wisata di desa Bejiharjo kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta sebagaimana merujuk pada tulisan Suwanto (2004:19), dapat dijelaskan berdasarkan beberapa aspek berikut:

a. Variabel Obyek dan Daya Tarik Wisata,

Suwanto (2014:19) menjelaskan bahwa, daya tarik wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Obyek dan daya tarik wisata di daerah tujuan wisata harus dikelompokkan dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya, dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata khusus wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang. Pada variable ini hasil penelitian menunjukan bahwa daya tarik obyek wisata di desa bejiharjo sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke desa bejiharjo yang terus meningkat sejak tahun 2010, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Table 2. jumlah kunjungan wisatawan tahun 2010 s.d 2015.

Tahun	Kunjungan wisatawan
2010	98
2011	5.421
2012	60.203
2013	74.144
2014	84.411
2015	75.515

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo, 201

Data tersebut mengindikasikan bahwa daya tarik obyek wisata yang dimiliki desa Bejiharjo sangat

tinggi, sehingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun sangat signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari beragamnya jenis obyek wisata yang ditawarkan di desa Bejiharjo mulai dari wisata berbasis alam, wisata, etualangan, wisata budaya dan wisata kuliner.

b. Variabel Prasarana Wisata

Variabel prasarana wisata menjelaskan bahwa, prasarana wisata yang dimaksud adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dimiliki oleh sebuah desa wisata. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa Bejiharjo, Ketua BPD Desa Bejiharjo dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo sejak Tahun 2010 telah mengelola prasarana obyek wisata alam, obyek wisata sejarah, obyek wisata kuliner, obyek wisata kesenian dan mendukungnya dengan sarana buatan seperti atraksi budaya, kuliner dan obyek wisata kerajinan. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo dan masyarakat Desa Bejiharjo pada Tahun 2010 juga telah membersihkan lingkungan di obyek wisata dan menata obyek-obyek wisata yang masih terlantar sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan. Selain itu, Prasarana wisata yang sudah disediakan di Desa Wisata Bejiharjo, antara lain listrik, air bersih, jaringan komunikasi, tempat sampah, tempat parkir, mushola, toilet dan sebagainya. Dengan adanya prasarana wisata tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan mempermudah akses wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Bejiharjo. Meskipun secara keseluruhan prasarana dasar wisata

tersedia, tetapi masih ada beberapa prasarana wisata yang tidak dirawat seperti beberapa kamar mandi yang terlihat mangkrak dan tidak dijaga oleh masyarakat setempat. Selain itu, prasarana penting seperti perbaikan akses jalan menurut pengakuan pokdarwis, pemerintah desa masih belum banyak melakukan pengembangan karena pemerintah desa belum mempunyai dana/anggaran untuk mengembangkan ataupun menyediakan prasarana wisata. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah desa Bejiharjo dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo mendapat bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sebesar Rp. 100.000.000,00 dan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 dimanfaatkan untuk memperbaiki dan menyediakan prasarana wisata seperti jalan dan prasarana lain.

c. Variabel Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel/home stay, alat transportasi, restoran/rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Hasil penelitian dari sumber data primer maupun sekunder menunjukkan bahwa sarana Wisata di Desa Bejiharjo

diusahakan secara mandiri oleh kelompok sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam menunjang kebutuhan wisatawan di Desa Wisata Bejiharjo Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan alat transportasi seperti pick up untuk mengangkut wisatawan ke lokasi wisata alam dan home stay bagi wisatawan yang ingin bermalam di desa Bejiharjo. Sarana wisata seperti alat transportasi dan home stay disediakan sendiri oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo saat ini telah disediakan 11 alat transportasi dan 24 home stay yang sudah disediakan. Namun sarana wisata yang ada di Desa Wisata Bejiharjo masih kurang memadai dan lengkap karena sehingga belum memberikan jaminan pelayanan yang nyaman bagi wisatawan.

d. Variabel Tatalaksana/Infrastruktur
Pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata diperlukannya tatalaksana/ infrastruktur yang mendukung fungsi sarana dan prasarana baik yang berupa sistem peraturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Dengan kata lain, pengembangan wisata di desa harus di dukung dengan adanya organisasi yang secara professional mengelola potensi wisata dengan baik. Berdasarkan analisis data lapangan, organisasi pengelola desa wisata di desa bejiharjo sudah berjalan namun masih terdapat beberapa kelemahan. Pembagian tugas antar unit dalam pengelolaan obyek wisata sudah terorganisir. Misalnya sudah terdapat website untuk mengakses dan

mendapat informasi tentang Desa Wisata Bejiharjo yang di sediakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo, tugas keamanan, dikelola oleh masyarakat desa yang bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk menjaga di sekitar obyek wisata, kemudiian sumber listrik dan air serta jaringan distribusinya sudah memadai.

Namun kondisi tersebut bukan tanpa kendala, salah satu masalah dalam aspek tatalaksana adalah masih kurang maksimalnya dukungan pemerintah desa dalam Aktivitas wisata Desa. Berdasarkan pengakuan beberapa kelompok pengelola wisata, pemerintah desa ternyata belum menyediakan anggaran khusus untuk meningkatkan daya dukung/pengembangan desa wisata. Pemerintah desa juga belum mengatur beberapa ketentuan mendukung pelestarian seni budaya dan sistem pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung setiap harinya di setiap obyek wisata. Tatalaksana/infrastruktur ini perlu dibuat oleh pemerintah desa guna melestarikan seni budaya lokal dan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar obyek wisata mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

e. Variabel Masyarakat/Lingkungan
Tujuan pariwisata di desa memerlukan adanya dukungan dari

masyarakat dalam berbagai hal karena masyarakat di sekitar obyek wisata yang akan menyambut kehadiran wisatawan dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan. Dalam upaya ini, masyarakat di sekitar obyek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat diketahui bahwa masyarakat telah memiliki banyak sekali peran dalam pengembangan Desa Wisata Bejiharjo. Peran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bejiharjo, antara lain masyarakat dalam menyambut wisatawan asing dengan menyajikan musik gamelan, masyarakat juga berperan dalam menyediakan sarana wisata dan prasarana wisata, masyarakat bersama dengan anggota TNI/Polri juga ikut menjaga keamanan di sekitar obyek wisata. Selain itu, pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pelatihan/sosialisasi antara lain: pelatihan bahasa asing kepada masyarakat, sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan kawasan wisata terhadap masyarakat, pelatihan terhadap masyarakat yang menjadi pemandu wisata dan pelatihan terhadap masyarakat yang menjadi anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo tentang peningkatan mutu sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Otonomi Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemerintah desa

untuk merencanakan program pembangunan di desanya. Program kerja desa diimplementasikan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa). Selain itu, pada aspek penggalan sumber keuangan, Pemerintah desa bersama masyarakat dapat memanfaatkan sumber dan potensi desa untuk dikembangkan secara ekonomi sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Kelompok masyarakat yang sadar Wisata (Pokdarwis) bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, sejak tahun 2010 sudah merintis upaya menggali, mengelola potensi melalui pengembangan obyek wisata desa. Pada tahun 2011 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) telah mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADesa) Bejiharjo. Nilai kontribusi dari sumber pengelolaan obyek wisata desa meningkat jumlahnya setiap tahun.

Kajian Upaya pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Bejiharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dianalisis dari pemenuhan prasarana desa wisata sebagaimana dirumuskan suwanto, (2004:14) menyajikan hasil sebagai berikut: a). Variable obyek wisata dan daya tarik wisata; pemerintah desa telah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menata ulang dan menggali obyek-obyek wisata yang sebelumnya belum ada sehingga dapat dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. b). Variabel prasarana

wisata; Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat telah menyediakan prasarana wisata yang dibutuhkan wisatawan berupa empat sampah, mushola, kamar mandi, warung makan dan sebagainya, sedangkan prasarana wisata yang masih belum disediakan adalah fasilitas kesehatan seperti klinik dan Apotek.

Klinik Kesehatan atau Apotek perlu disediakan bagi wisatawan karena jika wisatawan mendadak sakit bisa tidak jauh-jauh untuk membeli obat. c). Variabel sarana wisata; Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan sarana wisata bagi wisatawan berupa alat transportasi yaitu pick up dan untuk menginap sudah disediakan home stay.

Sarana wisata di Desa Wisata Bejiharjo ini masih belum lengkap karena belum disediakan gazebo dan rumah makan. d). Sedangkan dari aspek tatalaksana/infrastruktur; pemerintah desa telah membuat surat keputusan (SK) penetapan kelompok wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo, namun masih terdapat beberapa kelompok pengelola wisata yang belum memiliki SK penetapan sebagai pengelola wisata dari pemerintah desa. e). Aspek yang terakhir yaitu masyarakat/lingkungan; masyarakat telah berperan dalam menyambut wisatawan dan ikut menjaga kelestarian lingkungan di sekitar obyek wisata dan sebagainya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memki beberapa rekomendasi penting, antara lain:

- 1) Penguatan peran Pemerintah desa dalam mendukung aktivitas desa wisata dengan memasukan nya dalam rencana pembangunan desa, sehingga mendapat alokasi anggaran untuk pengembangan desa wisata.
- 2) Pemerintah desa perlu menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata untuk menjaga kelestarian ekosistem di sekitar obyek wisata dengan cara memberikan sosialisasi terkait pembatasan jumlah wisatawan di objek wisata.
- 3) Pemerintah Kabupaten (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata kabupaten Gunungkidul) dan Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan manajemen pengelolaan obyek wisata kepada masyarakat dan kelompok pengelola wisata.
- 4) Pemerintah desa seharusnya memberikan teguran ataupun sanksi kepada Kelompok-kelompok Sadar Wisata yang belum memberikan kontribusi pendanaan setiap bulan ke kas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Dinoroy M. 2016. Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12, No. 3, September
- Astuti, Tri. 2014. Upaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Kominfo Kota Samarinda Dalam Pengembangan Objek Wisata Desa Budaya Pampang. Jurnal Administrasi Negara Vol. 4, No. 2. Hal.177-178.
- Attar. Hakim dan, Yanuwadi .2013. Analisis Potensi Dan Arah Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji dan Kota Batu . Journal of Indonesian Tourisme and Development Studies , Vol.1, No.2, hal 68-70
- Buku Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014
- Edwin, Gamar. 2015. Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata Dikecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif Vol 3, No. 1.
- Imron. M. Bashori .2015. INITIATING THE PATHWAY TO INCREASE THE REGION'S INCOME BY DEVELOPING TOURISM VILLAGE OF PANGLIPURAN BALI. Jurnal Bina Praja. Volume 7 Nomor 4 Edisi Desember. Hal : 279 – 288
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 75 ayat (1)Permendagri No. 37 Th. 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (3) , ayat (4) butir a dan b, ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan (7)
- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet 2012. Metode
- Widjaja, HAW 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Tekat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Website
[Http://Gunungkidulpost.Com/2015/06/Jumlah-Desa-Wisata-Di-Gunungkidul-Terus-Meningkat](http://Gunungkidulpost.Com/2015/06/Jumlah-Desa-Wisata-Di-Gunungkidul-Terus-Meningkat), (diakses pada tanggal 2 Desember 2016)
- Yoeti, Oka A. 2002. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, Jakarta: PT. Perca.